

## **Pengaruh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

**Zhakia Nathasha Siregar<sup>1</sup>, Nur Azlina<sup>2\*</sup>, Rofika<sup>3</sup>**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru*  
zhakia.siregar@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of communication, information technology, and leadership style on local government readiness in implementing SIPD in Siak Regency. The sample used in this study is the Regional Apparatus Organization (OPD) in Siak Regency with a total of 29 OPD. The sampling method used is purposive sampling. The source of data in this study is primary data using a research instrument in the form of a questionnaire distributed to 174 respondents. The data analysis technique used in this research is descriptive multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that communication, information technology, and leadership style affect the readiness of local governments for implementing SIPD in Siak Regency.*

**Keywords:** *Communication, information technology, leadership style, readiness for implementation of SIPD*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Siak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Siak yang berjumlah 29 OPD. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebar ke 174 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kabupaten Siak.

**Kata kunci:** Komunikasi, teknologi informasi, gaya kepemimpinan, kesiapan pelaksanaan SIPD

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintah daerah mulai mengalami perubahan sejak diterapkannya otonomi daerah dan reformasi sektor publik yang telah dilakukan pada berbagai sektor pemerintahan, termasuk sektor keuangan. Perubahan ini tentu memberikan dampak bagi sistem pemerintahan. Pada umumnya, perubahan regulasi dilakukan agar peraturan semakin relevan dengan kondisi pemerintahan, dan juga sebagai wujud akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahannya.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah pun membentuk peraturan daerah (Perda) yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah.

Sehubungan dengan reformasi keuangan ini maka pemerintah menerbitkan paket undang-undang bidang keuangan sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik, yaitu Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan atas Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terjadinya reformasi sektor publik ini mengharuskan adanya keterlibatan pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing, termasuk urusan keuangan daerah.

Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Kewajiban ini diamanatkan dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, ditetapkanlah aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Menurut Permendagri No. 70 tahun 2019, SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dijelaskan bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu SIPD. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Permendagri No. 70 tahun 2019, SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Keberhasilan pelaksanaan SIPD tentunya sangat dibutuhkan agar pemerintah mampu menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam perubahan regulasi dan kerjasama dari berbagai pihak terkait.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan regulasi. Diantaranya komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting karena dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Azlina *et al* (2020) menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP 12 Tahun 2019. Namun, Iznillah (2015) menunjukkan bahwa komunikasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam perubahan regulasi adalah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang berguna untuk meningkatkan efektivitas suatu program. Indriani dkk (2018) menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual. Namun, Iznillah (2015) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual.

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam perubahan regulasi. Kesiapan dalam mengikuti perubahan tentunya tak luput dari dukungan pimpinan, hal ini tentu mempengaruhi kinerja antar pegawai karena pimpinan merupakan kepala dari suatu bidang pekerjaan. Basri (2021) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan PP No. 12 tahun 2019. Namun, Arih dkk (2017) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori institusional**

Teori institusional (*institutional theory*) menjelaskan terbentuknya organisasi terjadi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi (DiMaggio dan Powell, 1983). Terdapat 3 jenis tekanan isomorfisme dalam teori institusional, yaitu tekanan koersif, tekanan mimetik, dan tekanan normatif.

Tekanan koersif adalah ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur, praktik-praktik, atau aturan tertentu, baik karena diatur Undang-Undang atau karena adanya tekanan dari organisasi lain. Tekanan mimetik adalah ketika organisasi meniru atau mencontoh organisasi lainnya, biasanya disebabkan adanya ketidakpastian standar terhadap suatu organisasi, dan pimpinan organisasi akan mengarahkan bawahannya untuk meniru organisasi yang telah berhasil dalam penerapan suatu ketentuan dan praktik. Tekanan normatif merupakan tekanan yang muncul karena adanya tekanan profesionalisme.

### **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Permendagri No. 70 Tahun 2019). Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya. Menteri dalam negeri menimbang bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu SIPD. Menurut Permendagri No. 70 tahun 2019 pasal 6 ayat (1) dan (2), SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses melalui situs jaringan resmi kementerian dalam negeri.

### **Kesiapan untuk berubah**

Kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu (Arikunto, 2021). Sedangkan kesiapan berubah memiliki arti sejauh mana karyawan siap secara mental, psikologis atau fisik, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam proses aktivitas pengembangan organisasi, terutama lebih merujuk pada kondisi di mana karyawan akan memiliki skor yang tinggi pada dukungan dan partisipasi dalam perubahan. (Hanpachern *et al.*, 1998)

Menurut teori yang disampaikan oleh Armenakis, karyawan yang siap untuk berubah akan percaya bahwa organisasi akan mengalami kemajuan apabila organisasi melakukan perubahan, selain itu mereka memiliki sikap positif terhadap perubahan organisasi dan memiliki keinginan untuk terlibat dalam pelaksanaan perubahan organisasi (Szabla *et al.*, 2017). Sebaliknya, apabila para karyawan tidak siap untuk berubah, maka mereka tidak akan dapat mengikuti dan merasa kewalahan dengan kecepatan perubahan organisasi yang sedang terjadi (Hanpachern *et al.*, 1998).

### **Pengaruh komunikasi terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

Menurut Suryanto (2015) komunikasi adalah proses yang di dalamnya semua partisipasi atau pihak-pihak yang berkomunikasi saling menciptakan, membagi, menyampaikan, dan bertukar informasi antara satu dan lainnya dalam rangka mencapai pengertian bersama. Komunikasi adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses implementasi karena dibutuhkannya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat berperan dalam pemberian kewenangan kepada

pemerintah daerah. Diperlukan komunikasi yang baik agar kewenangan yang diamanatkan mudah untuk dipahami dan dikerjakan oleh pihak pemerintah daerah.

Azlina dkk (2020) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah Rokan Hulu dalam penerapan PP 12 Tahun 2019. Hal senada juga ditemukan oleh Saputri dkk (2021) yang menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP 12 Tahun 2019

### **Pengaruh teknologi informasi terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya (Darmawan, 2012). Teknologi Informasi merupakan salah satu faktor yang berguna untuk meningkatkan efektivitas suatu program. Dalam teknologi informasi tentu terdapat beberapa komponen utama.

Indriani dkk (2018) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah daerah Aceh telah melengkapi peralatan yang diperlukan seperti *hardware*, *software* yang dalam hal ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan koneksi internet. Staf yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan akrual sistem berbasis umumnya telah terbantu dengan kehadiran perangkat lunak SIPKD.

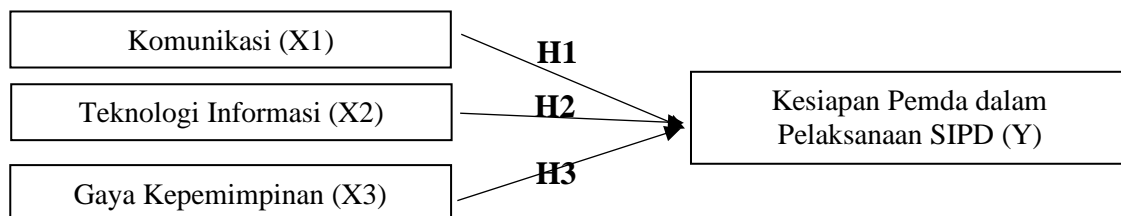
### **Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

Hasibuan (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat bekerja sama secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi. Danim (2012) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan (Simanjuntak, 2010). Maka dari itu, dibutuhkan dukungan yang kuat dari pimpinan yang diharapkan dapat memotivasi karyawannya dalam menyelesaikan tugasnya.

Basri (2021) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan PP No. 12 tahun 2019. Azlina dkk (2020) juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah Rokan Hulu dalam pelaksanaan PP No 12 tahun 2019.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian seperti pada Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Hipotesis penelitian, sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD
- H<sub>2</sub>: Teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD
- H<sub>3</sub>: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD

## METODE

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan. Sedangkan variabel dependennya adalah kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Siak. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Daftar OPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini seperti pada Tabel 1.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai yang berpartisipasi serta mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan, sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/PPK Unit SKPD, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah skala likert.

**Tabel 1. Daftar sampel OPD**

No.	Nama OPD	Kabupaten	Jumlah Responden
1.	Sekretariat Daerah	Siak	6
2.	Sekretariat DPRD	Siak	6
3.	Inspektorat Daerah	Siak	6
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Siak	6
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Siak	6
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Siak	6
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Siak	6
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Siak	6
9.	Badan Keuangan Daerah	Siak	6
10.	Dinas Lingkungan Hidup	Siak	6
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Siak	6
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Siak	6
13.	Dinas Kesehatan	Siak	6
14.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Siak	6
15.	Dinas Pariwisata	Siak	6
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Siak	6
17.	Dinas Pertanian	Siak	6
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Siak	6
19.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Siak	6
20.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Siak	6
21.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Siak	6
22.	Badan Pusat Statistik	Siak	6
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Siak	6
24.	Dinas Ketahanan Pangan	Siak	6
25.	Dinas Perhubungan	Siak	6
26.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Siak	6
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Siak	6
28.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Siak	6
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	Siak	6
<b>TOTAL</b>			<b>174</b>

**HASIL PENELITIAN**

Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Rincian jumlah sampel dan pengembalian kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Total kuesioner yang dibagikan	174	100%
2	Total kuesioner yang kembali	158	90,81%
3	Total kuesioner yang tidak kembali	16	9,19%
4	Total kuesioner yang tidak dapat digunakan	2	1,15%
<b>Total kuesioner yang dapat digunakan</b>		<b>156</b>	<b>89,66%</b>

Sumber: Data Output SPSS

Hasil uji validitas tiap variabel disajikan pada tabel 5 – 8.

**Tabel 5. Hasil uji validitas variabel kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD (Y)**

No.	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		R hitung	R tabel	
1	Y1	0.590	0.157	Valid
2	Y2	0.667	0.157	Valid
3	Y3	0.696	0.157	Valid
4	Y4	0.717	0.157	Valid
5	Y5	0.755	0.157	Valid
6	Y6	0.667	0.157	Valid
7	Y7	0.644	0.157	Valid

Sumber: Data Output SPSS

**Tabel 6. Hasil uji validitas variabel komunikasi (X1)**

No.	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		R hitung	R tabel	
1	X1.1	0.711	0.157	Valid
2	X1.2	0.655	0.157	Valid
3	X1.3	0.634	0.157	Valid
4	X1.4	0.722	0.157	Valid
5	X1.5	0.809	0.157	Valid
6	X1.6	0.767	0.157	Valid
7	X1.7	0.745	0.157	Valid
8	X1.8	0.676	0.157	Valid
9	X1.9	0.600	0.157	Valid

Sumber: Data Output SPSS

**Tabel 7. Hasil uji validitas variabel teknologi informasi (X2)**

No.	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		R hitung	R tabel	
1	X2.1	0.805	0.157	Valid
2	X2.2	0.842	0.157	Valid
3	X2.3	0.761	0.157	Valid
4	X2.4	0.728	0.157	Valid
5	X2.5	0.752	0.157	Valid

Sumber: Data Output SPSS

**Tabel 8. Hasil uji validitas variabel gaya kepemimpinan (X3)**

No.	Pertanyaan	Validitas		Keterangan
		R hitung	R tabel	
1	X3.1	0.531	0.157	Valid
2	X3.2	0.770	0.157	Valid
3	X3.3	0.786	0.157	Valid
4	X3.4	0.804	0.157	Valid
5	X3.5	0.734	0.157	Valid
6	X3.6	0.774	0.157	Valid
7	X3.7	0.784	0.157	Valid
8	X3.8	0.792	0.157	Valid
9	X3.9	0.748	0.157	Valid
10	X3.10	0.301	0.157	Valid

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai R hitung pada semua item pertanyaan indikator variabel lebih besar dari 0,157 sehingga telah memenuhi syarat validitas. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cronbach alpha*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 9.

**Tabel 9. Hasil uji reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kesiapan Pemda dalam Pelaksanaan SIPD	0.777	Reliabel
2.	Komunikasi	0.871	Reliabel
3.	Teknologi Informasi	0.834	Reliabel
4.	Gaya Kepemimpinan	0.884	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas, ditunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai instrumen adalah reliabel atau dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri atas uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji asumsi klasik seperti pada Tabel 10 – 11 dan Gambar 1.

**Tabel 10. Hasil pengujian normalitas data**

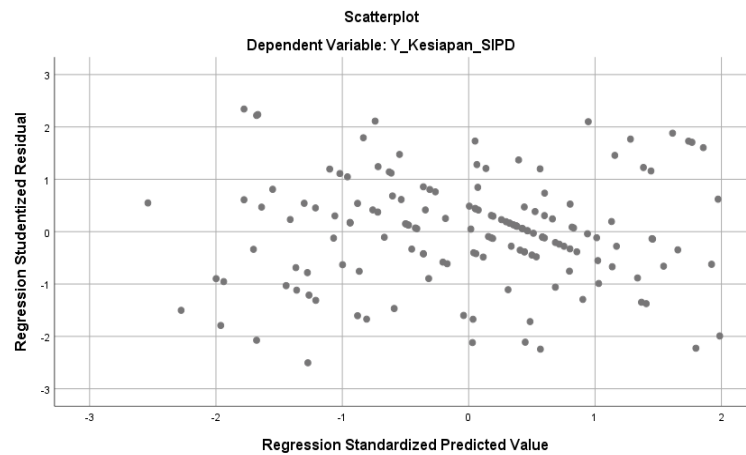
		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,33532739
Most Extreme Differences	Absolute	0,063
	Positive	0,063
	Negative	-0,060
Test Statistic		0,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Output SPSS, 2022

**Tabel 11. Hasil uji multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Komunikasi	0.954	1.048
Teknologi Informasi	0.995	1.005
Gaya Kepemimpinan	0.950	1.053

Sumber: Data Output SPSS, 2022



**Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisitas**  
Sumber: Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 10 – 11, diperoleh nilai signifikansi *unstandardized residual* atau Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Varians Inflating Factor* (VIF). Nilai *tolerance* menunjukkan nilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi penelitian. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan grafik *scatterplot* (Gambar 2) menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas. Setelah model telah lolos dari uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda. Hasil uji dapat disajikan pada Tabel 12.

**Tabel 12. Analisis regresi linier berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,750	2,571		0,292	0,771
Komunikasi	0,122	0,048	0,148	2,551	0,012
Teknologi Informasi	0,140	0,068	0,117	2,052	0,042
Gaya Kepemimpinan	0,451	0,040	0,652	11,218	0,000

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Dari Tabel 12, didapatkan model persamaan regresi akhir seperti persamaan (1).

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3$$

$$Y = 0,750 + 0,122X_1 + 0,140X_2 + 0,451X_3 \dots\dots\dots(1)$$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 13.

**Tabel 13. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ )**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,716	0,512	0,502	2,35826

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,502. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesiapan pelaksanaan SIPD dapat dijelaskan oleh komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan sebesar 50,2%, sedangkan sisanya sebesar 49,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara persial digunakan uji statistik t. Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 14. Hasil uji hipotesis (uji t)**

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
Komunikasi	2.551	1.976	0.012	Berpengaruh
Teknologi Informasi	2.052	1.976	0.042	Berpengaruh
Gaya Kepemimpinan	11.218	1.976	0.000	Berpengaruh

Sumber: Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 14 dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi komunikasi sebesar  $0,012 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $2,551 > t$  tabel 1,976. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan diterima dengan hasil variabel komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. Nilai signifikansi teknologi informasi sebesar  $0,042 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $2,052 > t$  tabel 1,976. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan diterima dengan hasil variabel teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. Nilai signifikansi gaya kepemimpinan sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan t hitung sebesar  $11,218 > t$  tabel 1,976. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan diterima dengan hasil gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD.

## PEMBAHASAN

### **Komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

Komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor penting karena dibutuhkannya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah pusat berperan dalam pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah. Diperlukan komunikasi yang

baik agar kewenangan yang diamanatkan mudah untuk dipahami oleh pihak pemerintah daerah. Selain pemerintah pusat dan daerah, komunikasi yang baik juga perlu dilakukan oleh atasan dan para pegawai agar pekerjaan yang diberikan dalam proses implementasi SIPD dapat diselesaikan dengan baik sesuai tujuannya.

Sesuai dengan teori institusional, terdapat beberapa tekanan isomorfik dalam teori tersebut, salah satunya tekanan koersif. Tekanan koersif terjadi ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur, praktik-praktik, atau aturan tertentu, baik karena diatur Undang-Undang atau karena adanya tekanan dari organisasi lain. Dalam hal ini tentu diperlukan adanya sosialisasi mengenai SIPD kepada tiap OPD sebelum diimplementasikan. Sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan SIPD. Pimpinan dan atasan pun turut memberikan instruksi dan penjelasan mengenai SIPD kepada para pegawainya, hal tersebut dapat dilakukan dengan diadakannya pelatihan dan rapat evaluasi bulanan antara pegawai dan atasan.

### **Teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

Teknologi Informasi merupakan salah satu faktor yang berguna untuk meningkatkan efektivitas suatu program. Teknologi informasi yang memadai tentu diperlukan dalam penerapan SIPD yang berbasis sistem informasi, dalam menjalankan sistem informasi pun diperlukan kelengkapan perangkat keras, perangkat lunak, dan ketersediaan jaringan. Keadaan teknologi informasi yang tidak memadai tentu akan menghambat proses pelaksanaan SIPD.

Senada dengan penjelasan hipotesis sebelumnya, terdapat salah satu jenis tekanan isomorfik dalam teori institusional, yaitu tekanan koersif. Tekanan koersif terjadi ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur, praktik-praktik, atau aturan tertentu, baik karena diatur Undang-Undang atau karena adanya tekanan dari organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983). Pelaksanaan SIPD ini merupakan hal baru yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tentunya harus melengkapi ketersediaan teknologi informasi di masing-masing OPD mereka untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan SIPD.

### **Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD**

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang dimanfaatkan pemimpin untuk mempengaruhi karyawan dengan tujuan sasaran organisasi terwujud (Rivai, 2014). Kesiapan dalam mengikuti perubahan tentunya tak luput dari dukungan pimpinan, hal ini dapat mempengaruhi kinerja antar pegawai karena pimpinan merupakan kepala dari suatu bidang pekerjaan. Dukungan kuat yang diberikan oleh pimpinan serta kerja sama yang baik antara pimpinan dan karyawan dalam menghadapi perubahan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam kesiapan menghadapi perubahan.

Seperti yang telah dipaparkan pada teori institusional, terjadinya perubahan struktur, aturan, dan undang-undang merupakan salah satu bentuk tekanan isomorfik koersif. Dalam hal ini, peran pimpinan sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan kerja yang sehat dan menjalin kerja sama yang baik antar para pegawai dalam kesiapan menghadapi perubahan aturan dan pelaksanaan aturan baru, dalam hal ini adalah SIPD. Gaya kepemimpinan yang baik tentunya akan membawa dampak pada kenyamanan dan kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat membawa dampak optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam lingkup instansi.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi, teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SIPD. Diperlukan komunikasi yang baik agar kewenangan yang diamanatkan mudah untuk dipahami oleh pihak pemerintah daerah. Teknologi informasi yang memadai juga merupakan hal yang penting karena SIPD merupakan sistem yang berbasis sistem informasi. Selain itu, dukungan kuat yang diberikan oleh pimpinan serta kerja sama yang baik antara pimpinan dan karyawan dalam menghadapi perubahan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam kesiapan menghadapi perubahan.

Untuk penelitian mendatang, peneliti menyarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen lainnya karena masih terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kesiapan pemda dalam menghadapi perubahan regulasi. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian di Kabupaten/Kota lain karena peraturan mengenai SIPD ini merupakan salah satu peraturan baru dan belum banyak yang meneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2021). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 3*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Azlina, N., Naza, A. & Julita. (2020). Analysis of governments readiness for regulatory changes: moderation effect of organizational commitment. *Integrated Journal of Business and Economics*, Vol. 4 No. 2, hal. 170.
- Basri, Y.M. (2021). Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 6 No. 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.22020>. Diakses pada 31 Mei 2021.
- Danim, S. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Darmawan, D. (2012). *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*. 48(2) PP.147-160.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanpachern, C., Morgan, G.A. & Griego, O. V. (1998). An extension of the theory of margin: a framework for assessing readiness for change. *Human Resource Development Quarterly*, Vol. 9 No. 4. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hrdq.3920090405>. Diakses pada 20 Agustus 2021.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Indriani, M., Mulyany, R., Nadirsyah, N. & Munandar, W. (2018). Readiness of local government in the implementation of accrual accounting: The case of local government in Aceh, Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 5 No. 1, hal. 87–100.
- Iznillah, M.L. (2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 2 No. 2, hal. 34086.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019
- Rivai, Z. V. (2014), *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saputri, S.M., Azlina, N. & Rofika. 2021. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, dan sarana prasarana terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP 12 tahun 2019. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*. Vol. 5 No. 1, hal. 58–90.
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat.
- Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia. *Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi Kedua*. Yogyakarta. ALFABETA.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Szabla, D.B., Pasmore, W.A., Barnes, M.A., & Gipson, A.N. (2017). *The Palgrave Handbook Of Organizational Change Thinkers*, New York. NY: Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014